

Potret Pendidikan Indonesia dalam Puisi "Sajak Anak Muda" Karya WS Rendra

Rosalia Prismarini dan Josep J. Darmawan

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Jembatan Merah No. 84 C, Yogyakarta

Email: orchid_odise@yahoo.com

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta 55281

Email: josepdarmawan@gmail.com

***Abstract:** Education is a sub-system that interrelates with other essential sub-systems. In the New Order era, the government policy on education had given rise myths that stimulate youth to prefer things pragmatically and instantly. Education, then, is no longer experienced and perceived as humanizing process. Poetry is one of transmitting message channel using many symbols that contain portraits of such situation. Using semiotic approach, this essay explains the myths and ideologies on education in Indonesia using one of WS Rendra's poem: "Sajak Anak Muda".*

***Key words:** poetry, education, semiotics, myths, message*

***Abstrak:** Pendidikan merupakan sub-sistem yang interelatif dengan sub-sub sistem lain. Pada jaman Orde Baru implementasi kebijakan pendidikan telah melahirkan mitos hingga melahirkan anak didik yang lebih suka pada hal-hal pragmatis dan instan. Pendidikan tidak lagi dihayati sebagai proses yang memasyarakat. Puisi adalah satu media penyampaian pesan dengan banyak perlambang, yang di dalamnya dapat ditemukan suatu potret situasi. Menggunakan pendekatan semiotik, tulisan ini mencoba membongkar mitos dan ideologi tentang pendidikan di Indonesia melalui puisi karya Rendra berjudul "Sajak Anak Muda".*

***Kata Kunci:** puisi, pendidikan, semiotika, mitos, pesan*

Membaca jejak pendidikan, tidak semata dilihat dari aktor-aktor intelektual dan para pendidik yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dari konteks kesejarahan yang sudah dilalui hingga melahirkan generasi-generasi penerus bangsa di jaman ini. Pendidikan meliputi seluruh proses pemuliaan, yang merupakan pembentukan moral manusia muda melalui interaksi informal antara dia dan lingkungan hidup manusia muda itu (Drost dalam Harefa, 2002:95). Ilmu tersebut antara lain bisa berupa tradisi, pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan (keberadaban). Peradaban kuno mencatat metode-metode penyampaian ajaran ada yang melalui tembang, kidung, puisi atau cerita sederhana (biasanya tentang kepahlawanan).

Bermula dari kebiasaan orang Yunani tempo dulu yang mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seorang pandai tertentu, kegiatan ini dilakukan untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-ikhwal yang mereka rasakan memang perlu untuk mereka ketahui. Mereka menyebut kegiatan itu dengan kata atau istilah *skhole*, *scola*, *scolae* atau *schola*.

Keempatnya mempunyai arti yang sama yaitu “waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar” (*leisure devoted to learning*). Lama-kelamaan kebiasaan mengisi waktu luang untuk mempelajari sesuatu itu tidak semata-mata menjadi kebiasaan kaum lelaki dewasa atau sang ayah dalam susunan keluarga inti masyarakat Yunani kuno. Kebiasaan itu kemudian diberlakukan bagi putera-puteri mereka, terutama anak-anak lelaki yang diharapkan menjadi pengganti sang ayah (Topatimasang, 1998:6). Akhirnya secara institusional berkembanglah apa yang disebut *Academia/lyceum* di Athena, sebuah institusi sekolah yang dirintis oleh Plato.

Pendidikan dipercaya merupakan kunci untuk memperbaiki keadaan dunia. Kondisi sosial, politik dan budaya turut mempengaruhi perkembangan pendidikan. Jika menengok dalam sejarah Indonesia, sistem pendidikan Indonesia jaman kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan jaman Hindia Belanda. Waktu itu sekolah-sekolah didirikan oleh pemerintah Belanda untuk mendidik pegawai rendahan karena daerah jajahannya bertambah luas, sehingga perlu lebih banyak pegawai (Said, 1981:45). Hal ini sebenarnya merupakan bagian dari politik etis atau politik asosiasi yang bertujuan untuk memberi kemakmuran pada Indonesia. Melalui politik ini mereka menyelenggarakan pendidikan, irigasi dan emigrasi. Tugas pokok politik etis di lapangan pendidikan adalah memberi pengajaran yang bersifat kebelanda-belandaan pada sekolah kelas 1 (HIS), mendirikan sekolah desa pada 1903 yang memberi pelajaran membaca, menulis, bahasa daerah dan menggambar.

Pada rejim Orde Baru, yang didominasi dengan misi pembangunannya, sekolah-sekolah menjadi tempat untuk “mencetak” generasi-generasi pekerja. Mirip seperti zaman kolonial di mana pendidikan menghasilkan tenaga pegawai atau tenaga buruh untuk pemerintah kolonial atau perusahaan swasta, bedanya kali ini mereka melayani kepentingan negara. Salah satu masalah yang sama terkait pendidikan era paska-kemerdekaan sampai sekarang adalah tentang pengangguran. Meski memang ada sedikit perbedaan, kalau dulu banyak yang “menganggur” karena keterbatasan kelas dan tenaga pengajar, sekarang lebih karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil dan daya saing yang sangat ketat. Permasalahan lain adalah, setiap pergantian menteri pendidikan, selalu tentang kurikulum yang dipermasalahkan dan kemudian diganti.

Tulisan ini berusaha melihat potret pendidikan pada suatu masa melalui sebuah puisi ”Sajak Anak Muda” karya W.S. Rendra, mencoba memahami bagaimana Rendra mengartikulasi pesannya tentang pendidikan. Mengeksplorasi ”makna” terhadap sebuah karya masa lalu dengan sendirinya telah membuka ”ruang dialog” dengan berbagai makna masa kini. Puisi sebagai sebuah karya sastra yang dapat dipakai untuk menguraikan ikhtisar sejarah sosial bisa dijadikan referensi untuk melihat kondisi dan situasi di masa kini. Problem bidang pendidikan yang dikemas oleh Rendra dalam teks

ini menimbulkan konsekuensi untuk melakukan proses dialektik, yakni memahami lebih jauh agar dapat mewujudkan pengertian tentang pesan-pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Pemaknaan terhadap teks yang disajikan oleh Rendra, merupakan komunikasi antara pembaca dan pengarang, yang menghasilkan sebuah pemahaman tentang konteks peristiwa yang terjadi.

Karya sastra dapat dipandang sebagai komunikasi. Tugas memahami karya sastra, dalam hal ini puisi adalah menangkap dua variabel penting dan mendasar yang dieksplorasi untuk menemukan totalitas makna. Pertama, tentang "ruang batin" dan konteks sejarah yang menjadi latar hadirnya sebuah karya. Kedua, variabel "internal teks" yakni dimensi linguistik itu sendiri. Dalam kacamata struktural sebuah teks memiliki dasar-dasar pengertian yang saling terkait antara teks yang satu dengan teks yang lain. Totalitas memahami makna teks karya sastra selalu berangkat dari interrelasi variabel pengaruh yang saling menentukan. Sebuah karya sastra tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, psikologis, bahkan historis ketika karya itu diciptakan. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang lahir dari pengalaman kemanusiaan, termasuk pengalaman hidup keseharian. Pengalaman tersebut muncul dari interaksi dengan masyarakat dan penghayatan akan fakta-fakta sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan humaniora. Puisi adalah interpretasi penyair terhadap kondisi masyarakat sekitarnya, yang di dalamnya memuat pesan-pesan tertentu.

Dalam pandangan Maman S. Mahayana, sastra adalah roh kebudayaan. Ia lahir dari proses yang rumit kegelisahan sastrawan atas kondisi masyarakat dan terjadinya ketegangan atas kebudayaannya. Sastra sering juga ditempatkan sebagai potret sosial, mengungkapkan kondisi masyarakat pada masa tertentu dan memancarkan semangat zamannya. Dari sanalah, sastra memberi pemahaman yang khas atas situasi sosial, kepercayaan, ideologi, dan harapan-harapan individu yang sesungguhnya merepresentasikan kebudayaan bangsanya (www.fordisastra.com, diakses tanggal 17 Januari 2009).

Komunikasi antara pembaca dengan teks (puisi) akan menstimulasi interpretasi terhadap isi yang termuat dalam puisi tersebut. Proses mental, iklim budaya, kondisi sosial sampai suasana hati pembaca akan mempengaruhi apa yang ditangkap pembaca dari puisi. Komunikasi tersebut mengandalkan keaktifan pembaca, di mana pembaca mempunyai peluang untuk ikut terlibat membentuk dunia yang dipaparkan pengarang. Ketika membaca sastra, kita tidak bertanya apa maksud penulis, tetapi apa makna teks. Dengan seluruh prasangka dan wawasan yang terbawa dalam diri, kita berdialog dengan teks. Teks yang baik adalah yang membuka diri dan menyediakan pelbagai cakrawala yang bisa kita pilih untuk menguji kebenaran kita.

Puisi menjadi salah satu alternatif media komunikasi karena dengan simbolismenya mampu menyampaikan pesan pada khalayak tentang suatu hal. Dalam perspektif Strukturalisme Praha,

sastra digambarkan sebagai suatu proses komunikasi, sebagai suatu dialog yang terus-menerus antara pengarang dan pembaca. Sebagai media komunikasi, karya sastra tidak bisa dipisahkan dari bahasa sastra sebagai sistem model kedua, sebagaimana diintroduksi oleh Lotman:

Metafora, konotasi dan ciri-ciri penafsiran ganda lainnya, bukanlah bahasa biasa, melainkan sistim komunikasi yang telah sarat dengan pesan kebudayaan. Bahasa sastra adalah kebudayaan itu sendiri. Kehidupan manusia dibangun atas dasar bahasa, sedangkan bahasa itu sendiri adalah sistem tanda (Ratra, 2004 : 111).

Dieter Janik menyatakan bahwa dari sudut pandang teori komunikasi, ada 3 lapisan komunikasi yang dapat dikenali dalam teks sastra. Lapisan pertama berkenaan dengan hubungan komunikasi antara pengarang, teks dan pembaca. Lapisan kedua dan ketiga didapati dalam teks itu sendiri, tingkatan kedua terdiri atas komunikasi antara narator dan pembaca implisit (*implied reader*, menunjuk pada peran pembaca dalam teks), tingkatan ketiga terdiri atas hubungan komunikasi timbal balik antar pelaku dalam teks. Dalam penelitian sastra jelas bahwa seseorang harus memanfaatkan dukungan yang ditawarkan semiotik karena komunikasi manusia adalah salah satu obyek yang mungkin dari semiotik (Segers, 2000:15).

METODOLOGI PENELITIAN

Proses membaca adalah memberi makna pada sebuah teks. Proses membaca sebuah karya sastra ini merupakan proses yang memerlukan pengetahuan sistem kode yang cukup rumit, kompleks dan beraneka ragam. Sistem kode tersebut adalah kode bahasa, kode budaya dan kode bersastra yang khas (Teeuw, 1983:12-15). Interpretasi terhadap puisi dapat dilakukan apabila analisis (memberi arti) telah selesai, terlepas dari apakah analisis itu dilakukan secara tertulis atau lisan, ataukah hanya merupakan aktivitas mental atau aktivitas fisik penganalisis. Kemampuan interpretasi amat tergantung pada “kekayaan” seseorang di bidang pengalaman, kepekaan dalam bidang seni, keterlibatan di dalam berbagai aspek kehidupan dan tentu saja kebiasaan interpretasi itu sendiri (Atmazaki, 1993:129).

Pemaknaan terhadap puisi ditegaskan oleh Juhl Hirsch, dalam Ratra (2004:307), dengan membedakan antara *meaning* (arti) dan *significance* (makna). *Meaning* adalah arti sebagaimana dimaksudkan oleh pengarang sedangkan *significance* adalah nilai sebagaimana dihasilkan oleh pembaca. Arti karya sastra hanya satu, yang disebut sebagai pesan penulis, tidak ambigu, sedangkan maksud tergantung pada situasi pembaca. Mengenai hal ini Atmazaki (1993:121-129) menyampaikan bahwa interpretasi terhadap sajak didasarkan pada asumsi: 1) Sajak adalah lompatan-lompatan pikiran jitu, kilasan-kilasan pengalaman yang muncul sesaat dan terlepas-lepas;

2) Sajak memuat atau membawa pandangan dunia atau ideologi tertentu; 3) Sajak memberikan inspirasi dan pemikiran baru; dan 4) Sajak selalu ambiguitas, mengandung banyak makna tanpa dapat dipastikan mana yang paling benar.

Lebih lanjut dikatakan bahwa memahami sajak bukan sekedar tahu arti kata-kata, tapi yang penting justru dalam kaitan apa dan bagaimana arti itu menempati konteksnya yang tepat. Ada yang menginterpretasi dengan melihat konteks sejarahnya (termasuk penyair), ada pula yang mencari tema dan pesan-pesan yang disampaikan. Bahkan meski teks itu sendiri tidak memperlihatkan tendensi atau sudah memiliki arti yang jelas, sebuah puisi tetap memerlukan interpretasi. Tidak ada puisi yang tidak memerlukan interpretasi, karena dengan interpretasi suatu puisi menjadi hidup.

Michael Riffaterre menyuguhkan konsep yang berhubungan dengan pemaknaan puisi, bagaimana membacanya agar menemukan pesan. Menurutnya karya sastra merupakan ekspresi tidak langsung, yaitu menyatakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung dengan cara lain. Ketidaklangsungan ekspresi itu merupakan konvensi sastra pada umumnya. Ketidaklangsungan itu disebabkan tiga hal (Pradopo, 1995:134-135):

1. Penggantian arti (*displacing of meaning*), disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra. Metafora dan metonimi dalam arti luasnya untuk menyebut bahasa kiasan secara umum. Metafora itu bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti bahasa kiasan lainnya.
2. Penyimpangan arti (*distorting of meaning*). Penyimpangan disebabkan oleh tiga hal, yaitu ambiguitas, kontradiksi dan *nonsense*. Ambiguitas disebabkan bahasa sastra itu berarti ganda. Kegandaan itu dapat berupa kegandaan sebuah kata, frase ataupun kalimat. Kontradiksi berarti mengandung pertentangan yang disebabkan oleh paradoks atau ironi. *Nonsense* adalah kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti, sebab hanya berupa rangkaian bunyi, tidak terdapat dalam kamus.
3. Penciptaan arti (*creating of meaning*). Penciptaan arti ini merupakan konvensi kepuhitan yang berupa bentuk visual yang secara linguistik tidak mempunyai arti tapi menimbulkan makna dalam sajak, diantaranya adalah pembaitan, persajakan (rima), tipografi.

Secara khusus ada teks tertentu yang menjadi latar penciptaan sebuah karya, yang oleh Riffaterre disebut *hipogram*, sedangkan teks yang menyerap dan mentransformasikan hipogram itu dapat disebut sebagai teks transformasi. Untuk mendapatkan makna hakiki tersebut dipergunakan metode intertekstual, yaitu membandingkan, menjajarkan dan mengkonstraskan sebuah teks transformasi dengan hipogramnya. Untuk dapat memberi makna sajak secara semiotik, pertama kali dapat dilakukan dengan pembacaan *heuristik* dan *hermeneutik* atau *retroaktif*. Pembacaan heuristik

adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya, secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra berdasarkan sistem semiotik tingkat kedua atau berdasarkan konvensi sastranya.

Ideologi dalam Karya Sastra

Peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang, yang sering menjadi bahan sastra adalah pantulan hubungan seseorang dengan Tuhan, alam semesta, masyarakat, manusia lain dan dirinya sendiri. Hubungan hakiki itulah yang kemudian melahirkan berbagai masalah yang dihadapi manusia, antara lain masalah maut, tragedi, cinta, loyalitas, harapan, makna dan tujuan hidup serta hal-hal transendental seperti kekuasaan, politik dan ideologi. Di sinilah kekuatan sastra karena berurusan dengan *universal truth*, yaitu merupakan sebuah keseluruhan yang mempunyai struktur, koherensi dan relevansi. Sastra lebih banyak berisi persoalan-persoalan *humanisme universal*, seperti masalah kemiskinan, keterasingan manusia dari lingkungan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, korupsi, dan lain sebagainya. Oleh Wellek, dalam Santosa (2000:251), ini disimpulkan bahwa sastra sering dikaitkan dengan masalah kekuasaan, ideologi dan politik sehingga ada anggapan bahwa studi masalah “sastra, kekuasaan dan ideologi” hanya akan menarik dan mengenai sasaran bila dikaji secara ekstrinsik.

Menurut Teeuw, dalam Pradopo (1995:167), karya sastra tidak lahir dalam situasi kosong kebudayaan. Interelasi yang kompleks antara kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya pada suatu masa memunculkan suatu hegemoni. Hegemoni mementingkan budaya sebagai konsep, karena budaya dapat dilihat sebagai yang melekat pada “distribusi khusus dari kekuasaan dan pengaruh”. Konsep ini juga berbicara tentang bagaimana kita membentuk kehidupan kita. Konsep kedua hegemoni adalah ideologi, yang menurut perspektif Marxis mengekspresikan dan memaparkan kepentingan khusus sebuah kelas. Ideologi memiliki batasan untuk mensistematiskan dan memformulasikan makna-makna yang lebih atau kurang mengenai kesadaran (Berger, 2000:60-61).

Ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* (ide atau gagasan) dan *logos* (studi tentang, ilmu pengetahuan tentang). Dilihat dari arti melioratif, ideologi adalah setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal ideal, filosofis, ekonomis, politis dan sosial. Namun dalam penggunaan modern, ideologi mempunyai arti peyoratif (negatif, jelek) sebagai teorisasi atau spekulasi dogmatik dan khayalan kosong yang tidak betul atau realistis, atau bahkan palsu dan menutup-nutupi realitas yang sesungguhnya. Dari perspektif Marx dan Engles, istilah ini mengacu

pada seperangkat keyakinan yang disajikan sebagai obyek, padahal sebenarnya hanya mencerminkan kondisi-kondisi material masyarakat (Bagus, 2000:306).

Berkaitan dengan beberapa definisi di atas, menurut Raymond Williams ideologi memiliki tiga fungsi (Fiske, 1990:165), yaitu:

1. Sebagai sebuah sistem kepercayaan yang menjadi karakteristik terutama pada suatu kelas atau kelompok (*A system of beliefs characteristics of a particular class/group*).
2. Sebagai sebuah sistem kepercayaan yang menyesatkan. Pemikiran salah atau kesadaran palsu, yang dapat dipertentangkan dengan kebenaran atau ilmu pengetahuan yang alamiah (*A system of illusory beliefs, false consciousness which can be confronted with true or scientific knowledge*).
3. Sebagai proses yang umum dalam produksi makna dan gagasan (*the general process of the production of meaning and ideas*).

Melihat tiga fungsi tersebut mencoba dirumuskan arti ideologi, meskipun definisi ini tidak selalu tepat karena harus mempertimbangkan konteks penggunaannya. Menurut Karl Marx ideologi berarti diterimanya gagasan atau pemikiran-pemikiran kelas berkuasa (*bourgeois*) atau kelas pekerja (*proletar*) dan masyarakat sebagai hal yang wajar dan alami. Selanjutnya kaum proletar dibuat tidak sadar akan kenyataan bahwa mereka tertindas sehingga memunculkan apa yang disebut kesadaran palsu. Berbeda dengan pernyataan John Fiske, bahwa seluruh proses komunikasi berikut seluruh maknanya memiliki dimensi sosial politik dan tidak bisa dipahami di luar konteks sosialnya. Prinsip kerja ideologi semacam ini selalu memihak *status quo*, yaitu kelas yang memiliki kekuatan dominan dalam produksi benda maupun produksi ide dan makna.

Dari deskripsi-deskripsi tersebut terlihat bahwa dalam “membaca” karya sastra tidak bisa hanya mengandalkan analisis secara struktural, di mana strukturalisme hanya menekankan pada otonomi karya sastra. Hal tersebut karena analisis struktural memiliki dua kelemahan, di antaranya melepaskan karya sastra dari rangka sejarah sastra dan mengasingkan karya sastra dari rangka sosio-budayanya (Teeuw, 1983:61). Oleh karena itu penting juga untuk memahami situasi politik, sosial dan budaya pada karya sastra yang dibuat.

Puisi merupakan refleksi transformasi pengalaman dan kehidupan manusia, baik secara nyata maupun hanya rekaan yang dipenggal-penggal dan kemudian dirangkai kembali dengan imajinasi, persepsi dan keahlian pengarang serta disajikan melalui media (bahasa). Peninjauan secara intrinsik-ekstrinsik atau sebaliknya berlaku dalam melihat wacana kekuasaan, politik dan ideologi dalam karya sastra (puisi). Kekuasaan tidak terlepas dari ideologi dan politik karena ketiganya saling menyatu (Mohamad *via* Santosa, 2000:252).

Penegasan konsep ideologi yang disubstitusikan pada persoalan *humanisme universal*, dapat dilihat pada karya-karya W. S. Rendra. Karya puisinya dapat disebut sebagai puisi-puisi yang berisi pemberontakan Rendra terhadap ketidakadilan, pada mereka yang tertindas (“orang-orang kecil”) dan fokusnya terhadap realitas kemanusiaan yang semakin tipis. Persoalan penipuan, korupsi, kekejaman politik, kebobrokan moral yang terjadi di negeri ini merupakan tema dasar yang diungkapkan. Pengungkapan puisinya mencerminkan kecamannya pada para pemimpin bermoral *bejat*, korup, pemeras, licik dan pembohong (Djusen *via* Fananie, 2000:23-24).

Pendekatan Semiotik dalam Puisi

Semiotik merupakan salah satu pendekatan dalam analisis media, yang berkaitan dengan makna dari tanda dan simbol dalam bahasa. Menelaah puisi berarti kita menafsirkan makna dari ungkapan penyair. Untuk kebutuhan itu faktor genetik diperlukan, yang meliputi penyair dan kenyataan sejarah, bahkan sejarah sastra, angkatan atau zaman terciptanya karya sastra akan menolong kita memahami puisi secara lebih tepat. Unsur-unsur tersebut saling mengikat membentuk totalitas makna yang utuh, sedangkan faktor genetik dapat memperjelas makna yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan khas penyair (konteks). Jadi untuk memahami puisi selain dilakukan dengan mengidentifikasi struktur fisik dan struktur batin yang terdiri dari unsur-unsur pembangun dalam puisi, juga perlu melihat faktor genetiknya.

Teks sangat penting dibaca dalam hubungan dengan teks lain, karena bila dipisahkan dapat menimbulkan kesalahan. Tahapan tersebut terkait dengan penelitian linguistik struktural yang menggunakan teknik intratekstual dan intertekstual. Secara intratekstual teks atau tulisan data primer dapat digunakan analisis sintagmatik. Analisis ini menjelaskan teks secara linier, yakni suatu teks akan diuraikan lebih lanjut menurut unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Intertekstual memiliki asumsi bahwa sebuah teks sastra selalu terkait dengan teks-teks lain sebagai referensi maupun acuannya. Hubungan antarteks itu bisa kepada teks sastra lain, bisa juga hingga berupa tiruan atas alam semesta (dalam pengertiannya yang lebih luas), atau menurut analisis paradigmatis, suatu teks dihubungkan dengan konteksnya.

Proses tersebut juga terkait dengan kode budaya Barthes yang mencoba memahami bahasa dalam puisi berdasarkan latar belakang kebudayaan bahasa tersebut. Langkah-langkah yang digunakan untuk menelaah puisi yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut (Waluyo, 1991:146-148):

1. Struktur karya sastra. Pada tahap ini berusaha memahami secara umum, puisi tersebut termasuk dalam struktur puisi lama, baru, angkatan 45, atau puisi kontemporer. Dilihat dari

bentuk termasuk konvensional atau non-konvensional. Di sini penulis memahami bait-bait dan lirik-lirik serta memahami secara umum tema yang dikemukakan penyair.

2. Telaah unsur-unsur

- a. Unsur-unsur yang ditelaah yakni unsur yang ada dalam struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik digunakan untuk mengungkapkan struktur batin dan bagaimana struktur batin dikemukakan.
 - b. Struktur fisik membahas bagaimana penyair memilih, mengurutkan dan memberi sugesti kata (diksi), bagaimana verifikasi dalam puisi itu, bagaimana penyair menyusun tata wajah puisi, menciptakan pengimajian dan lambang, kiasan (majas).
 - c. Nilai artistik sebuah karya sastra terletak dari tepat tidaknya penyair mengungkapkan struktur batinnya ke dalam struktur fisik. Struktur batin meliputi luapan rasa hati penyair, tingkat imajinasi (pengalaman) dan tingkat pemikiran penyair. Maka dengan memahami struktur fisik akan memungkinkan pembaca menghayati makna yang hendak disampaikan penyair karena tema, perasaan, nada dan amanat disampaikan lewat struktur fisik.
3. Penyair dan kenyataan sejarah. Tahap selanjutnya melihat latar belakang penyair, bagaimana aliran filsafat, corak khas yang menjadi ciri penyair, kata-kata khusus yang berhubungan dengan penyair. Selain itu juga melihat konteks zaman ketika puisi itu diciptakan.
4. Sintesis dan interpretasi. Sintesis merupakan jawaban dari pertanyaan: apa pesan yang hendak disampaikan penyair? Mengapa penyair menggunakan bahasa yang demikian (hubungannya dengan perasaan dan nada), apa arti karya sastra tersebut bagi peneliti? Bagaimana sikap peneliti terhadap apa yang dikemukakan penyair? Bagaimana penyair menciptakan puisi itu?

Menganalisis tahap selanjutnya adalah dengan menggunakan konsep-konsep semiotika Rolland Barthes. Kajian semiologi Barthes meliputi kesusastraan, film, busana dan berbagai fenomena budaya lain. Mitos sebagai kajian dari semiotik Barthes dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Mitos dapat berbentuk verbal atau visual, tidak hanya tertulis. Bentuk-bentuk tersebut di antaranya: fotografi, film, pertunjukkan, iklan, busana, TV, lirik lagu. Puisi sebagai salah satu bentuk kesusastraan dapat dibaca sebagai sebuah teks. Proses pemaknaan bertingkat Rolland Barthes digambarkan sebagai berikut :

1. signifier	2. signified
3. sign (<i>meaning</i>)	
(I. signifier) <i>Form</i>	(II. signified) <i>Concept</i>
(III. sign) <i>Signification</i>	

(Sumber: Sunardi, 2002:350)

1. Pemahaman tingkat pertama (*first order signification*) meliputi penemuan-penemuan tanda dalam puisi. Dalam hal ini melibatkan penemuan serta pengelompokkan terhadap unsur-unsur tanda (yang terdiri dari *signifier* dan *signified*) dalam suatu sistem dan melakukan interpretasi secara apa adanya terhadap temuan tanda tersebut atau dengan kata lain, melakukan interpretasi pemaknaan denotatif terhadap larik atau baris dalam puisi, melalui identifikasi dan pemberian arti terhadap struktur fisik dan batin puisi.
2. Pemaknaan tingkat kedua (*second order signification*) dalam tahap ini proses pemaknaan terhadap puisi dilakukan melalui pemaknaan secara holistik terhadap unsur-unsur konotasi, ideologi maupun mitos di dalam tanda itu sendiri yang telah diarahkan melalui tahap pertama. Pada pemaknaan tingkat kedua ini bisa melibatkan faktor genetik puisi dan intertekstualitas.

HASIL PENELITIAN

Rendra adalah salah satu penyair yang mencoba menyampaikan keterlibatannya pada suatu masa, setelah Indonesia mengesep kemerdekaan selama kurang lebih 25 tahun. Dalam kumpulan sajaknya "*Potret Pembangunan dalam Puisi*" (PPdP), Rendra mengekspresikan protes-protesnya terhadap berbagai situasi sosial, budaya, politik dan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang disorotinya, situasi tersebut muncul secara eksplisit pada beberapa larik dalam puisi-puisinya. Penulis mengangkat "Sajak Anak Muda" sebagai bahan bagaimana Rendra memotret situasi pendidikan di Indonesia pada paruh kedua tahun 1970-an, sebagai berikut:

Sajak Anak Muda

- (1) Kita adalah angkatan gagap
yang diperanakan oleh angkatan takabur.
Kita kurang pendidikan resmi
di dalam hal keadilan,
karena tidak diajarkan berpolitik,
dan tidak diajar dasar ilmu hukum.

- (2) Kita melihat kabur pribadi orang,
karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa.
- (3) Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus,
karena tidak diajar filsafat atau logika.
- (4) Apakah kita tidak dimaksud
untuk mengerti itu semua?
Apakah kita hanya dipersiapkan
untuk menjadi alat saja ?
- (5) Inilah gambaran rata-rata
pemuda tamatan S.L.A,
pemuda menjelang dewasa.
- (6) Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan.
Bukan pertukaran pikiran.
- (7) Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan,
dan bukan ilmu latihan menguraikan.
- (8) Dasar keadilan di dalam pergaulan,
serta pengetahuan akan kelakuan manusia,
sebagai kelompok atau sebagai pribadi,
tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji.
- (9) Kenyataan di dunia menjadi remang-remang.
Gejala-gejala yang muncul lalu lalang,
tidak bisa kita hubung-hubungkan.
Kita marah pada diri sendiri.
Kita sebal terhadap masa depan.
Lalu akhirnya,
menikmati masa bodoh dan santai.
- (10) Di dalam kegelapan,
kita hanya bisa membeli dan memakai,
tanpa bisa mencipta.
Kita tidak bisa memimpin,
tetapi hanya bisa berkuasa,
persis seperti bapa-bapa kita.
- (11) Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat.
Di sana anak-anak memang disiapkan
Untuk menjadi alat industri.
Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti.
Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa?
Kita hanya menjadi alat birokrasi!
Dan birokrasi menjadi berlebihan
tanpa kegunaan-
menjadi benalu di dahan.
- (12) Gelap. Pandanganku gelap.
Pendidikan tidak memberi pencerahan
Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan
Gelap. Keluh kesahku gelap.
Orang yang hidup di dalam pengangguran.
- (13) Apakah yang terjadi di sekitarku ini?
Karena tidak bisa kita tafsirkan,
lebih enak kita lari dalam puisi ganja.

- (14) Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini?
Apakah ini? Apakah ini?
Ah, di dalam kemabukan,
wajah berdarah
akan terlihat sebagai bulan.
- (15) Mengapa harus kita terima hidup begini?
Seseorang berhak diberi ijasah dokter,
dianggap sebagai orang terpelajar,
tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan.
Dan bila ada tirani merajalela,
ia diam tidak bicara,
kerjanya cuma menyuntik saja.
- (16) Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja
Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum
dianggap sebagai bendera-bendera upacara,
sementara hukum dikhianati berulang kali.
Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi
dianggap bunga plastik,
sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi.
- (17) Kita berada di dalam pusaran tatawarna
yang ajaib dan tidak terbaca.
Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan.
Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan.
Dan bila luput,
kita memukul dan mencakar
ke arah udara.
- (18) Kita adalah angkatan gagap.
Yang diperanakkan oleh angkatan kurangajar.
Daya hidup telah diganti oleh nafsu.
Pencerahan telah diganti oleh pembatasan.
Kita adalah angkatan yang berbahaya.

23 Juni 1977, Pejambon, Jakarta

Analisis Semiotik dan Signifikasi

Bait 1 terdiri dari dua kalimat (6 larik): "*Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan berpolitik, dan tidak diajar dasar ilmu hukum.*". Dalam kutipan tersebut terdapat penyimpangan morfologis pada kata "diperanakkan", biasanya menggunakan kata "peranakan" atau dilahirkan.

Makna denotasi yang dapat dibaca dari bait 1 adalah gagap=gangguan bicara, takabur=sombong. Bait pertama sajak ini menggambarkan bahwa kita adalah angkatan atau generasi yang gagap, yang dilahirkan oleh generasi yang sombong atau takabur. Kita juga kurang mendapat pendidikan resmi (pendidikan formal di sekolah) dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan ilmu politik dan ilmu hukum.

Makna konotasi yang dapat diperoleh adalah angkatan gagap merupakan metafora dari keturunan yang tidak cakap, keturunan atau generasi bisu. Angkatan takabur=keturunan penguasa atau diktator. Generasi penerus kita tidak diajarkan untuk bersikap dan berpikir dengan adil. Ironisnya hal ini terjadi secara turun-temurun, sehingga selalu melahirkan keturunan yang sewenang-wenang dan tidak mampu untuk berbuat atau bertindak secara nyata untuk masyarakat.

Bait 2 terdiri dari 1 kalimat (2 larik): "*Kita melihat kabur pribadi orang, karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiw, mengandung imaji visual. Pada bait ke-2 ini terdapat penyimpangan sintaksis, yaitu susunan kalimat "melihat kabur"*".

Makna denotasi yang terkandung dalam bait 2 tersebut adalah kita melihat atau memperhatikan pribadi orang secara samar-samar atau kabur, karena tidak dilatih atau diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak diajarkan melihat orang dari sisi psikologisnya, sehingga tidak bisa menilai seseorang secara obyektif.

Makna konotasi yang dapat diperoleh adalah kita tidak bisa menghayati keunikan pribadi setiap orang, karena kita tidak dididik untuk "*bisa rumangsa*" atau bisa merasakan dan peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Ketika terjadi kerusuhan waktu itu, disebabkan oleh justifikasi atau stigma yang dilekatkan pada seseorang. Kita menganggap semua orang sama saja, seperti benda mati yang selalu sama dan kaku.

Bait 3 terdiri dari 1 kalimat (2 larik): "*Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus, karena tidak diajar filsafat atau logika*", merupakan versifikasi bait sebelumnya yaitu tentang sebab akibat dari kondisi anak muda, ditandai dengan frase "*karena tidak diajar*". Versifikasi ini merupakan penegasan sekaligus menjadi hal yang penting.

Makna denotasi yang dapat ditangkap adalah selama ini kita tidak bisa memahami uraian pikiran yang logis, karena tidak diajarkan filsafat atau logika. Kita tidak mampu berpikir logis atau lurus, karena tidak diajarkan filsafat atau logika, sedangkan makna konotasinya adalah kita tidak mampu mengatasi persoalan dan menghadapi masalah dengan jernih, karena tidak menggunakan logika dan hati. Hal seperti ini seharusnya juga menjadi tugas lembaga pendidikan, yang bisa lebih sistematis dalam memberikan berbagai aspek pengajaran pada anak didiknya.

Bait 4 terdiri dari 2 kalimat (4 larik): "*Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja?*". Pada bait tersebut terdapat penyimpangan sintaksis yaitu susunan kata pada kalimat 1 (larik 1 dan 2), "*Apakah kita tidak dimaksud*", seharusnya menggunakan kata diarahkan atau ditujukan.

Makna denotasi pada bait ini mempertanyakan kembali apa yang telah ditulis pada bait satu sampai tiga. Kata "*itu semua*" yang dimaksud adalah ajaran tentang keadilan, berpolitik, ilmu

hukum, ilmu jiwa, filsafat atau logika. Apakah kita tidak diajarkan untuk memahami atau mengerti semua itu? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Makna konotasi yang ditemukan pada bait ke-3 ini adalah sebuah sindiran atau gugatan terhadap pendidikan di Indonesia, yang hanya berorientasi untuk menjadikan para muridnya sebagai pekerja, seperti mesin (menunggu perintah). Pendidikan yang tidak memanusiakan, terjadi dehumanisasi karena tujuannya sebagai alat semata. Hal ini berpengaruh pada gaya hidup yang selalu mengejar sukses materi tanpa disertai dengan pemaknaan hidup yang mendalam. Akibatnya orang selalu menitipkan harga diri pada materi dan jabatan yang menempel, tapi kepribadiannya keropos. Pribadi semacam ini oleh Erich Fromm disebut *having oeriented*, bukan *being oriented* pribadi yang obsesif untuk selalu mengejar harta dan status, tetapi tidak peduli pada pengembangan kualitas moral (www.kompas.com, diakses 18 Juni 2008)

Bait 5 terdiri dari satu kalimat (3 larik) "*Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja?*", mengandung imaji visual, ditunjukkan dengan kata "*gambaran*", terdapat penyimpangan leksikal pada kata "*tamatan*". Tamatan di sini yang dimaksud adalah lulusan.

Makna denotasi bait 5 menunjukkan gambaran secara umum kondisi lulusan pemuda lulusan SLA (Sekolah Lanjutan Atas), kondisi anak muda pada masa puber (menjelang dewasa). Bait lima ini sebagai penjelas dari bait 1-4. Gambaran atau kondisi yang dimaksud adalah tentang angkatan yang gagap, melihat kabur pribadi orang, pemuda yang mengerti uraian pikiran lurus dan hanya bisa menjadi alat atau sekedar menjadi pekerja.

Makna konotasi dari bait tersebut seolah-olah memberi sebuah permakluman pada anak-anak muda Indonesia, yang bebas dalam pergaulan, tetapi tidak tanggap terhadap persoalan di sekitarnya. Mereka hanya disiapkan untuk menjadi "robot-robot", tanpa tahu alasan dan tujuan dalam mengerjakan sesuatu.

Bait 6 terdiri dari 2 kalimat (2 larik): "*Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan. Bukan pertukaran pikiran*", terdapat penyimpangan sintaksis, larik kedua dari bait enam "*seharusnya*" masih lanjutan dari bait pertama, sehingga menggunakan tanda koma (setelah kata kepatuhan).

Makna denotasi yang dapat dibaca adalah bahwa pendidikan kita berasaskan pada kepatuhan atau aturan, bukan pada pertukaran pikiran. Makna konotasi yang muncul adalah sistem pendidikan di Indonesia tidak dialogis, tapi berjalan searah sehingga anak didik seperti robot atau pasif. Menurut Thomas Armstrong (Susilo, 2007:96), masyarakat saat ini sedang mengalami penderitaan karena salah ajar (*dysteachic community*). Dalam praktek pembelajaran di sekolah siswa bersusah payah menyesuaikan gaya belajarnya dengan gaya mengajar guru. Peserta didik dianggap sebagai

gelas kosong yang dapat diisi dengan air sampai penuh, sehingga di dalam kelas yang dilakukannya hanyalah berceramah. Gaya mengajar seperti itu akan mematikan daya kreatif peserta didik. Wajar kalau mereka enggan mengeluarkan pendapat maupun bertanya. Mereka hanya duduk, diam dan mendengarkan apa yang dibicarakan guru. Ada sebuah situasi penindasan yang melahirkan kebudayaan bisu, sehingga muncul ketakutan dan ketidakberdayaan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan sendiri.

Bait 7 terdiri dari 1 kalimat (2 larik): "*Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan, dan bukan ilmu latihan menguraikan*", tidak terdapat penyimpangan bahasa pada bait ini.

Makna denotasi dari bait ke-7 tersebut adalah pelajaran ilmu yang diajarkan di sekolah adalah pelajaran yang berhubungan dengan hafalan dan tidak diajarkan untuk belajar mendeskripsikan atau menguraikan. Makna konotasi yang terkandung adalah pendidikan mengajarkan pada kita untuk menelan mentah-mentah apa yang diberikan. "*Membeo*", sekedar mengikuti tanpa tahu maksud dan tujuannya. Tidak melatih untuk berpikir kritis, mencoba menganalisa apa yang terjadi di sekitarnya. Hal ini ditegaskan oleh Sayuti bahwa dalam perspektif Freirean, situasi manusia yang terasing dari realitas dirinya, yang "*menjadi ada*" dalam pengertian "*menjadi seperti orang lain*" dan bukan dirinya sendiri (Sayuti, 2002:17).

Bait 8 terdiri dari 1 kalimat (4 larik): "*Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan akan kelakuan manusia, sebagai kelompok atau sebagai pribadi, tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji*", tidak terdapat penyimpangan bahasa pada bait ini.

Makna denotasi dari bait ke-8 ini adalah bahwa asas atau hal-hal mendasar tentang keadilan diperoleh di dalam pergaulan dan pengetahuan tentang perilaku manusia sebagai kelompok maupun pribadi. Keadilan bukan sebuah ilmu yang perlu dikaji dan diuji, sedangkan makna konotasi yang diperoleh adalah pendidikan selain sarana aktivitas belajar-mengajar, seharusnya juga sebagai wadah penanaman nilai humanisme, pluralisme dan inklusivisme. Kebenaran dan keadilan tidak untuk dihafalkan atau diperdebatkan, namun seharusnya menjadi pegangan dalam setiap langkah. Dalam setiap pikiran, hati dan tindakan manusia nilai-nilai kebenaran dan keadilan selayaknya menjadi pedoman. Nilai-nilai tersebut seharusnya turut tertanam dalam setiap proses pembelajaran melalui kehidupan keseharian.

Bait 9 terdiri dari 5 kalimat (7 larik): "*Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang, tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya, menikmati masa bodoh dan santai*", terdapat imaji visual ditandai dengan kata "*remang-remang*". Pada bait ini juga terjadi penyimpangan sintaksis di mana susunan frase "*menikmati masa bodoh*" tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Makna denotasi yang dapat diungkap adalah realitas di dunia ini tidak jelas atau remang-remang, banyak tanda-tanda atau gejala yang datang berseliweran, lalu lalang, satu sama lain tidak saling berhubungan atau sulit untuk dihubungkan. Kita marah dan *sebal* terhadap diri sendiri dan masa depan, dan akhirnya bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh dan santai.

Makna konotasi dari bait tersebut adalah kenyataan remang-remang dan gejala lalu lalang, merupakan metafora dari seluruh kondisi yang carut-marut, serba tidak pasti. Kondisi dan situasi yang kacau atau serba tidak pasti menyebabkan kita menjadi apatis, putus asa, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan.

Bait 10 terdiri dari 2 kalimat (6 larik): "*Di dalam kegelapan, kita hanya bisa membeli dan memakai, tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa, seperti bapa-bapa kita*", mengandung imaji visual dan terdapat penyimpangan leksikal pada kata "*bapa*", karena biasanya yang dipakai bapak.

Makna denotasi bait 10 ini adalah bahwa dalam kegagalan atau ketidakcakapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tidak bisa menciptakan atau membuat sesuatu. Dalam kegagalan kita tidak bisa memimpin, tapi hanya bisa berkuasa, sama seperti bapa-bapa kita. Makna konotasi yang dapat ditelaah adalah ketika kita menjadi orang yang pasif dan tidak mengembangkan potensi serta akal budi, kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya dan berkreasi. Ketidakecetakan dalam berpikir dan bertindak, membuat kita melakukan sesuatu sesuai kehendak kita, tanpa berpikir panjang. Pribadi yang seperti ini melahirkan kesewenang-wenangan, seperti seorang diktator.

Bait 11 terdiri dari 6 kalimat (9 larik): "*Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat. Di sana anak-anak memang disiapkan. Untuk menjadi alat industri. Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi! Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan – menjadi benalu di dahan*". Bait ini mengandung metafora pada kalimat "*menjadi benalu di dahan*", maksudnya pengganggu atau perusak. Di samping itu pada bait ini juga terjadi penyimpangan sintaksis, karena kata "dan" diletakkan pada awal kalimat. Terdapat penyimpangan grafologis pada kata "*Untuk*" seharusnya huruf "U" tidak ditulis dengan huruf kapital. Penyimpangan grafologis juga terdapat pada penempatan tanda baca "—" yang seharusnya digunakan untuk kata ulang atau memisahkan suku kata.

Makna denotasi yang bisa diungkap adalah bahwa pendidikan di Indonesia berorientasi ke Barat, di mana anak-anak disiapkan untuk menjadi alat dari industri atau untuk menjadi pekerja. Industri di negara-negara Barat berjalan tanpa henti, sehingga membutuhkan banyak pekerja. Di Indonesia, kita hanya dipersiapkan menjadi alat birokrasi, sampai akhirnya birokrasi menjadi berlebihan, tidak ada gunanya dan hanya menjadi benalu atau mengganggu saja.

Makna konotasi dari bait tersebut adalah “*barat*” pada bait ini merupakan metafora dari negara-negara industri yang makmur, belahan dunia yang modern atau sering disebut sebagai negara dunia pertama. Termasuk dalam kelompok ini adalah negara-negara kaya seperti negara di Benua Eropa dan Amerika. Sedangkan lawannya, “*timur*” biasa disebut juga negara-negara dunia ketiga dan dilekatkan pada negara-negara miskin yang menguasai sedikit sumber daya. Indonesia sebagai bangsa yang baru saja lepas dari penindasan atau penjajahan bangsa asing (Eropa), mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan memperbaiki kondisi ekonomi melalui kerjasama internasional dan revolusi teknologi. Masyarakat Indonesia menuju era industrialisasi.

Industrialisasi di Indonesia dilakukan dengan proses percepatan pertumbuhan produksi barang-barang industri yang dilaksanakan di dalam negeri. Alih-alih ingin mengikuti jejak negara Barat, Indonesia agaknya tertatih-tatih dalam mengejar kemajuan mereka. Keterbatasan sumber daya, mendorong untuk memanfaatkan institusi pendidikan dalam mencetak manusia pekerja. Seperti dikatakan oleh Mangunwijaya bahwa, orang dididik untuk menjadi pelaksana setia dari pengambilan keputusan yang datang dari penguasa. Akhirnya pendidikan akan selalu menjaga kelangsungan dan konsolidasi hak-hak istimewa kaum elite dengan segala mekanisme hirarkinya (Mangunwijaya, 1980:12).

Bait 12 terdiri dari 7 kalimat (5 larik):”*Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberi pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran,* mengandung imaji visual yang ditandai dengan kata “*pandangan*”, dan imaji auditif pada kalimat “*keluh kesahku*”. Versifikasi kata “*gelap*” dan “*tidak memberi*” pada bait ini menimbulkan suasana sedih atau muram.

Makna denotasi dari “gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa (pandanganku gelap)” adalah bahwa pendidikan di Indonesia tidak bisa memberi pencerahan. Latihan-latihan atau ketrampilan tidak memberi pekerjaan atau bukan jaminan memperoleh lapangan kerja. Semua gelap, hanya tinggal keluh kesah, sebagai orang yang hidup di dalam pengangguran.

Makna konotasi dari “keluh kesahku gelap”, merupakan metafora dari keputusasaan yang mendalam, kekecewaan yang berat. Bait ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak mampu mendorong munculnya ketajaman akal budi. Sementara itu masih banyak terdapat pengangguran, orang-orang yang hidup dalam keterbatasan atau bahkan kekurangan. Tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi membuat latihan-latihan atau penguasaan ketrampilan yang belum memadai menjadi tidak berguna atau sia-sia.

Bait 13 terdiri dari 2 kalimat (3 larik): “*Apakah yang terjadi di sekitarku ini ? Karena tidak bisa kita tafsirkan, lebih enak kita lari dalam puisi ganja*”. Kata “*puisi ganja*” merupakan

metafora dari kenikmatan yang memabukkan, membuat sengsara. Bait tersebut mengandung penyimpangan sintaksis di mana penulisan kata penghubung “*karena*” ditempatkan di awal kalimat, seharusnya di tengah.

Makna denotasi dari “apakah yang terjadi di sekitarku ini? aku lirik mempertanyakan keadaan di sekitarnya. Dia tidak bisa memahami atau tidak mampu menafsirkan apa yang terjadi, sehingga memilih untuk lari mencari kesenangan, menenggelamkan diri dalam puisi ganja.

Makna konotasi yang dapat ditemukan adalah kondisi atau situasi yang mengkhawatirkan dan sulit ditebak, sehingga aku (lirik) merasa kehilangan harapan, putus asa atau menyerah dengan keadaan, karena tidak mampu berbuat apa-apa. Merasa bimbang dengan kondisi Indonesia yang makin tak menentu. Akhirnya aku (lirik) larut dengan kesenangannya sendiri, yang disimbolkan oleh Rendra “*larut dalam puisi ganja*”.

Bait 14 terdiri dari 4 kalimat (5 larik): “*Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Ah, di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan*”, mengandung imaji visual, yang ditandai dengan kalimat “*wajah berdarah*”. Versifikasi kalimat “*apakah ini?*” menggambarkan lambang suasana bingung.

Makna denotasi dari “apakah artinya tanda atau gejala-gejala yang sulit dimengerti ini? Apakah ini? Apakah ini? Ah, di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat seperti rembulan”. Makna konotasi dari bait ini menggambarkan keadaan yang serba sulit membuat kita mengikuti arus, mencari aman atau selamat dengan mengikuti dan mengabdikan pada orang-orang yang berkuasa atau mempunyai kekuasaan. Berbagai masalah yang terjadi dalam pendidikan, tidak pernah dijadikan kajian yang serius dalam *policy making*. Misalnya kita tahu dengan subsidi pemerintah, masyarakat mampu menyekolahkan anak ke SD meski dengan terseok-seok. Hal ini disebabkan karena biaya yang dipaksakan, seperti buku pelajaran non-terbitan Depdiknas, sepatu, seragam, serta transportasi dan uang saku untuk anak.

Pada tingkat SLTP lebih besar, persoalan ini klasik tapi tak ada solusi tidak ada yang signifikan. Orang tua masih dipermainkan sekolah dengan tidak menggunakan buku terbitan Depdiknas, membeli seragam, membayar ongkos transpor dan makanan anak sendiri. Ketika dihadapkan pada persoalan tersebut, pemerintah justru sibuk menata kembali peristilahan, *mengotak-atik* kurikulum, bermain-main dengan ujian nasional, bereksperimen dengan sistem pengelolaan sekolah dan mengacuhkan kendala yang terjadi di depan mata (www.kompas.com, diakses 18 Juni 2008).

Bait 15 terdiri dari 3 kalimat (7 larik): “*Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan*

keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja', mengandung imaji auditif, pada kalimat "*ia diam tak bicara*" dan terdapat penyimpangan sintaksis, karena kata "*dan*" sebagai kata penghubung ditempatkan di awal kalimat.

Makna denotasinya adalah mengapa kita menerima begitu saja, ketika seseorang berhak diberi ijazah dokter dan dianggap sebagai orang terpelajar, tapi tidak diuji pengetahuannya akan keadilan. Jika suatu ketika ada tirani merajalela, ia diam tak bicara karena pekerjaannya hanya menyuntik saja.

Makna konotasinya adalah pendidikan "*hanya*" melahirkan gelar dan menciptakan rutinitas kerja atau profesi tanpa dilandasi kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Selama ini produk pendidikan kurang membantu spiritualitas anak, sehingga mereka sulit mengagumi dan menghargai alam sekitarnya. Ini kesalahan proses pendidikan, yang hampir melupakan dimensi akal budi dan emosi serta tidak memandang alam sebagai suatu entitas yang hidup. Sebenarnya tidak ada benda mati di hadapan orang yang akal budinya hidup. Pendidikan kita kurang mengajarkan bagaimana bersahabat dan berdialog dengan kehidupan secara menyeluruh.

Bait 16 terdiri dari 4 kalimat (7 larik): "*Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi*, mengandung imaji auditif, ditandai dengan kata "*diam*" saja. Bait ini juga memiliki penyimpangan grafologis, karena tidak diberi tanda tanya pada kalimat "*Apakah kita akan terus diam saja*".

Makna denotasi tentang "*Bagaimana? Apa kita akan terus diam saja melihat kondisi ini?*" Ketika para mahasiswa ilmu hukum hanya dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara itu hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Masalah penegakan hukum dan pembangunan ekonomi merupakan beberapa hal yang rawan di negeri ini, tapi para intelektual di bidang tersebut tidak diberdayakan.

Makna konotasi dalam bait ini terlihat betapa *output* pendidikan (para mahasiswa) dianggap sebagai benda mati, tidak dilibatkan dalam proses untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih baik. Materi-materi yang diberikan dalam proses pendidikan atau *transfer of knowledge* tidak diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang hukum, ekonomi, dan disiplin ilmu lain hanya dipahami sebatas wacana. Ilmu-ilmu tersebut seolah-olah mandul, ketika tidak bisa digunakan sebagai pisau analisa dalam menyelesaikan persoalan, baik itu di bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Berbagai pelanggaran terjadi dan nampaknya mereka kalah atau tidak kuasa, tidak berdaya menghadapi teknokrat-teknokrat yang sewenang-wenang.

Bait 17 terdiri dari 4 kalimat (7 larik):”*Kita berada di dalam pusaran tatawarna yang ajaib dan tidak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara*”, mengandung imaji visual, ditandai dengan kata “*tata warna*” dan “*terbaca*”. Namun ada penyimpangan sintaksis pada kata “*Dan*” sebagai kata penghubung diletakkan di awal kalimat. Di samping itu bait ini juga mengandung imaji taktil yang ditunjukkan dengan kata “*menggapai*”, “*memukul*”, “*mencakar*”.

Makna denotasi yang diperoleh adalah bahwa kehidupan ini dikelilingi oleh berbagai pilihan, juga penuh dengan kejutan. Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Perjalanan atau lika-liku kehidupan, kadang membuat kita terkungkung, sibuk dengan rutinitas dan bahkan lupa diri. Manusia selalu berusaha untuk bertahan hidup dan mencari pegangan, namun kadang ketika tidak berhasil, mengumpat atau justru mencari kambing hitam. Kita memukul dan mencakar ke arah udara, membuang tenaga sia-sia karena marah terhadap sesuatu yang tidak jelas.

Makna konotasi dari bait ini adalah situasi di Indonesia semakin tidak menentu, membuat pemerintah sibuk dengan berbagai macam hal. Hal tersebut membuat mereka kurang memperhatikan generasi muda atau penerus yang bermental mudah menyerah dan selalu menyalahkan keadaan. Mereka lebih fokus dalam pembangunan di bidang fisik, memperbaiki kondisi perekonomian, dan penataan-penataan di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan.

Bait 18 terdiri dari 5 kalimat (5 larik): ” *Kita adalah angkatan gagap. Yang diperanakan oleh angkatan kurangajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya*”, terdapat penyimpangan sintaksis, yaitu dengan menempatkan kata penghubung “*yang*” di awal kalimat. Penyimpangan morfologis pada kata “*diperanakan*”, kata yang biasanya digunakan adalah “*dilahirkan*”. Beberapa kalimat dalam bait ini merupakan versifikasi dari bait pertama, mengandung imaji auditif pada kata “*gagap*”., sedangkan kata “*kurangajar*” merupakan diksi yang sarkastik.

Makna denotasi dari gagap=gangguan bicara. Kita adalah angkatan atau generasi yang sulit untuk bicara, kita dilahirkan oleh angkatan kurang ajar, generasi yang tidak tahu sopan santun. Daya hidup atau semangat hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya.

Makna konotasi pada bait ini bahwa subyek kita, merujuk pada aku dan kamu atau merujuk pada semua (orang) tanpa pandang bulu. Namun bila dilihat dari judulnya “*sajak anak muda*”, kita bisa berarti anak-anak muda Indonesia. Para pemuda ini telah dibelenggu, sehingga mereka kesulitan untuk mengungkapkan aspirasinya. Kemudian cara ini “*direproduksi*” sehingga generasi

selanjutnya melakukan penindasan. Tidak ada lagi semangat kemanusiaan, yang ada hanyalah mementingkan diri sendiri atau kalau perlu “mencakar” orang lain.

PEMBAHASAN

Sajak Anak Muda diawali dengan sebuah *judgment* terhadap anak-anak muda Indonesia yang gagap, bukan hanya mereka yang kurang pendidikan tapi juga yang telah mengenyam pendidikan. Mereka tidak peka terhadap lingkungan, menjadi generasi yang pasif, generasi yang “membeo” dan menerima begitu saja apa yang diberikan tanpa mampu mengkritisi. Pendidikan yang tidak dialogis membuat mereka menerima begitu saja realitas yang ada. Mereka menjadi pasif, tidak mampu mengungkapkan aspirasi dan ide-idenya. Dalam situasi seperti ini, pendidikan tidak bisa diharapkan untuk mendorong ketajaman budi.

Kegagapan ini terjadi karena proses pendidikan yang berlangsung hanya menganggap manusia sebagai objek bukan subyek, sebagai benda yang dapat dikendalikan. Erich Fromm dalam bukunya *The Heart Man* menyatakan bahwa pendidikan yang memandang orang sebagai objek, hanya akan menghasilkan sifat manusia *necrophily* (cinta benda mati) dan tidak menumbuhkan sifat *biophilly* atau cinta kehidupan (Murtiningsih, 2006:73). Orang yang dihinggapi *necrophily* hanya akan cinta pada segala sesuatu yang tidak bertumbuh dan segala sesuatu yang bersifat mekanis. Inilah yang nantinya akan melahirkan generasi yang tidak tanggap terhadap segala sesuatu di sekitarnya.

Kelahiran generasi gagap ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan yang dihubungkan dengan kehidupan praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi negeri ini, telah diterapkan sejak zaman Belanda. Sistem tersebut memperkuat kehidupan bisnis, sebagai bengkel latihan bagi tenaga kerja pribumi yang bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem industri Belanda (Dhakidae, 1980:2). Generasi yang lahir dari sistem seperti ini cenderung mengikuti arus, tidak mempunyai pendirian atau prinsip. Pendidikan hanya menciptakan rutinitas serta mencetak “mesin-mesin pekerja”.

Pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru “roh” pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masih terus berjalan, bahkan diperkuat dengan adanya pokok-pokok pikiran yang semula dimaksudkan untuk mengusahakan pembaharuan pendidikan: sistem pendidikan harus bersifat fungsional terhadap perkembangan masyarakat. Sistem fungsional tersebut adalah sistem pendidikan kejuruan yang tidak hanya sekedar menghasilkan angkatan kerja yang *trainable*, melainkan juga *marketable* yaitu tenaga yang bisa dijual dalam pasaran kerja (Dhakidae, 1980:2). Hal itu tidak berbeda dengan nasib pendidikan reguler (non-kejuruan), program pendidikan massal

yang dilakukan pada masa pemulihan (1966-1968) yang juga menimbulkan dampak negatif. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dan perguruan tinggi semakin banyak yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan harapan atau kemampuan akademik mereka dan akhirnya menjadi pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya terlalu lamban untuk dapat menyerap angkatan kerja yang meningkat 1,3 juta orang per tahun selama 1960-an. Mereka yang berhasil mendapat pekerjaan, kebanyakan dapat dikategorikan setengah penganggur, yakni bekerja 20 jam atau kurang dalam seminggu. Pada awal 1967, jumlah orang tidak bekerja diperkirakan antara 3 sampai 4 juta di daerah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 12 sampai 14 juta orang tercatat setengah menganggur (Mas'Oed, 1989:114). Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa meski telah mengenyam pendidikan, seseorang tetap tidak terjamin untuk mendapat pekerjaan sesuai yang diinginkan, karena hal ini juga terkait dengan perencanaan dan proses pembangunan. Arah pembangunan pada masa Orde Baru terlalu bertitik tolak pada segi ekonomis-teknokratis, seakan-akan hasil fisik dan angka kuantitatif saja yang perlu ditonjolkan.

Paradigma pertumbuhan yang diterapkan tampak jelas berimplikasi pada bidang pendidikan, di mana pendidikan hanya berhenti (dihentikan) pada polemik teknis mengenai bentuk dan *output* dalam jangka pendek. Kuatnya campur tangan negara menjadi penyebab hilangnya daya kritis masyarakat terhadap perkembangan yang ada. Selain itu juga karena adanya ideologisasi wacana keseragaman dengan memakai sistem birokrasi sebagai mesin penggerakannya (Susetyo, 2005:142). Birokrasi menjadi penentu bagi segala hal yang menyangkut pendidikan.

Pada Repelita I (1969-1974) kebijakan pendidikan tetap meneruskan pola lama, yakni dengan merencanakan kenaikan jumlah murid SD dari 13 juta menjadi 18 juta, tetapi hal itu tidak diimbangi dengan anggaran pembangunan pendidikan, di mana pemerintah hanya mengalokasikan 3,5% anggaran (Muller, 1979:78). Proyek SD Inpres yang dicanangkan dalam Repelita II (1974-1979) menjadi salah satu program untuk perluasan kesempatan pendidikan yang diselenggarakan, setelah Indonesia mendapat "berkah" berlimpah dari *oil boom*. Kebijakan-kebijakan itu memang dinilai mampu mencapai perluasan kuantitatif, tapi secara kualitatif masih terdapat ketimpangan-ketimpangan. Salah satu indikasi, misalnya, pada tahun 1977, masih ada 38,59 juta penduduk (dari total 133 juta penduduk) yang buta huruf (Lubis, 1980:19). Kebijakan pendidikan yang seperti itu, sejumlah besar tamatan SLP dan SLA tidak bisa melanjutkan sekolah karena daya tampungnya yang tidak memadai. Mereka juga tidak bisa bekerja karena tidak siap dan tidak rela. Golongan setengah terdidik itu menganggur dan semakin tidak puas, yang meningkatkan keresahan sosial.

Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia membuat generasi muda hanya berorientasi untuk memperoleh ijazah dan gelar sebagai simbol status yang melulu berorientasi pada jenis pekerjaan kerah putih (*white collar job*). Sementara, pemerintah juga mencoba mengatasi “ketidakcocokan” yang semakin besar antara jenis lapangan kerja yang mungkin diperoleh dengan harapan karier para pemuda (dan orang tua) atas dasar pendidikan mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memang mengarahkan generasi muda untuk menyesuaikan pendidikannya hanya dengan pekerjaan yang akan mereka jalani. Pendidikan dan lapangan kerja menjadi mitos yang terinternalisasi dalam benak kita, sehingga pendidikan hanya berhenti pada polemik teknis mengenai bentuk dan *output* pendidikan dalam jangka pendek.

Kita bisa merunut dari sejarah di akhir tahun 1800-an, di mana pendidikan waktu itu diadakan sebagai upaya melestarikan *status quo* (Snouck Hurgronje *via* Lubis, 1980:16-17). Pendidikan dijadikan tempat latihan bagi anak orang *ningrat* untuk menjadi kepanjangan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kita waktu itu begitu senang karena pemerintah kolonial merasa bersalah setelah mengeruk kekayaan alam kita tanpa memberi imbalan. Lalu mereka memberikan pendidikan sebagai balas budi, yang dikenal sebagai politik etis. Tetapi tidak banyak dari kita yang sadar bahwa politik etis hanyalah bentuk lain dari upaya pemerintah kolonial untuk melestarikan posisinya sebagai penguasa. Oleh sebab itu, jika pemerintah kolonial bicara tentang pendidikan, sebenarnya dia bicara tentang *the upper class* yang akan jadi *partner* pribumi dari pemerintah kolonial. Pendidikan untuk *the middle class* hanya terbatas sekali, sementara pendidikan untuk *the lower class* hampir tidak ada.

Pendidikan seolah menjadi barang mewah, yang hingga kemerdekaan dan memasuki Orde Baru pun masih belum merata. Cita-cita dalam UUD’45 yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa utuh diwujudkan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi rakyat kecil dan merata bagi seluruh rakyat belum bisa tercapai. Ketidakmerataan dalam pendidikan terjadi karena ketidakadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Bila pembangunan memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin, maka konsekuensi logis dari itu adalah melebarnya jurang antara si terdidik dengan si tidak terdidik (Muller *via* Lubis, 1980:19).

Tidak jarang sekolah sudah membuat semacam penggolongan dan seleksi (*tracking*) sejak awal, di mana anak-anak orang miskin sering diarahkan untuk mengenyam pendidikan yang dapat langsung membuat mereka bekerja, seperti misalnya mengarahkan mereka memilih jalur SMK. Cara pendekatan persoalan pendidikan juga menggunakan anggapan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah sebagai suatu investasi (Joesoef, 1971:309). Pendekatan seperti

ini sekilas tampak baik, namun sesungguhnya semakin menjauhkan mereka dari akuisisi modal budaya yang lebih tinggi yang memungkinkan mereka mengalami mobilitas sosial (Koesoema, 2008:32). Anak-anak ini tetap akan terpuruk dalam lapis bawah hirarki tenaga kerja dalam dunia industri. Pada tahun 1970an peningkatan pada pendidikan kejuruan memang ditekankan. Pendekatan pendidikan seperti ini mengindikasikan bahwa sekolah diperlakukan sebagai perpanjangan tangan dunia industri, menjadi penyedia tenaga kerja bagi pemilik modal.

Program penambahan jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian nampak lebih sebagai formalitas semata, ketika pertumbuhan ekonomi yang selalu dikumandangkan hasil-hasilnya hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Saat masih banyak masyarakat yang terbelenggu oleh kemelaratan, kesempatan yang luas dalam pendidikan jelas tidak bisa dimanfaatkan. Kemiskinan mereka tidak hanya bersifat lahiriah, tapi meresapi keseluruhan hidup dan kerja mereka hingga melahirkan “kebudayaan bisu” seperti yang digambarkan oleh Paulo Freire (Muller, 1980:47). Kebudayaan itu dibentuk dalam proses sejarah yang berabad-abad lamanya, yang oleh rakyat kecil hampir selalu dialami sebagai penindasan politis dan sosial serta pemerasan ekonomis. Kelompok besar rakyat yang miskin dan kurang pendidikan tidak memiliki kekuasaan untuk merubah nasibnya. Mereka juga tidak dalam posisi untuk mengambil manfaat dalam proses pembangunan (Sasono, 1979:21). Pengalaman sejarah kolektif dan kemelaratan yang tak kunjung habis telah mendarah daging dalam kehidupan rakyat kecil sehingga mereka terkurung dalam lingkungan sosial budaya yang tak bersuara dan tak berdaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi pendidikan yang dipotret pada rentang waktu 1970an memang tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi dan politik pada saat itu. Satu hal dapat dicatat, pendidikan merupakan bidang yang paling sering menjadi ajang eksperimentasi. Selain fenomena ganti menteri ganti kebijakan, ataupun alokasi dana program yang sangat kecil meski mengalami *oil boom*, pendidikan nasional sejak awal telah diabdikan untuk dalih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mempertahankan *status quo*. Pendidikan direduksi menjadi sangat pragmatis sehingga esensi pendidikan terkikis, di saat ketersediaan dan kualifikasi guru berbanding terbalik dengan melejitnya jumlah siswa, terutama di luar Jawa dan pedesaan (Surya, 2002:236). Implikasinya segera dapat ditemukan pada mental, daya tahan dan kreatifitas generasi muda yang rapuh, kering dan getas, yang semakin lama mewujud dan mengeras dalam sikap-sikap apatis-egois yang menjauhkan manusia satu dengan lainnya.

Kondisi tersebut dilengkapi dengan kebijakan "penundukan dan penjinakan" insan pendidikan oleh pemerintah dengan memberangus kegiatan-kegiatan yang bersifat politis. Sebagai akses dari Malari, kampus dan mahasiswa tak boleh lagi terjun dalam politik praktis dalam menyuarakan secara aktual-faktual aspirasi rakyat. Kegiatan yang harus diutamakan dan dioptimalkan adalah kegiatan ilmiah, kelompok studi, pembelajaran analisis yang sifatnya simulasi atau yang menjawab kebutuhan industri secara langsung. Inilah yang semakin menjauhkan insan pendidikan dengan realitasnya. Semakin membuat gagap anak muda karena orientasi dan kepentingannya dibuat berbeda dengan kondisi riil di masyarakat yang tak dipahaminya.

"Sajak Anak Muda" hanyalah salah satu dari sekian rekam jejak potret pendidikan sebagai satu upaya untuk memahami mengapa kita selalu bermasalah dalam bidang tersebut dan berimplikasi pada bidang-bidang lain. Tentu saja dari tulisan ini masih menyisakan banyak pertanyaan, antara lain apakah relevan rekam jejak itu digunakan sebagai bahan koreksi untuk keadaan saat ini? Apakah kita sungguh pernah memiliki nilai pendidikan yang mendasar bagi kepentingan pembangunan bangsa? Apakah kontribusi pendidikan bagi Indonesia selain bertambahnya jumlah orang pandai dan bebas 3B? Tulisan yang didasarkan dari pengerjaan skripsi ini masih penuh keterbatasan, dan mengandaikan perlunya studi lanjutan untuk "sekedar" bisa membangun gambaran tentang aspek yang telah lebih dari setengah abad usia kemerdekaan ini tak juga meyakinkan untuk melahirkan identitas dan kemampuan bangsa secara kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmazaki. 1993. *Analisa Sajak: Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Bandung: Angkasa.
- Bagus. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Berger, Asa, Arthur. 2000. *Teknik-teknik Analisis Media*. Alih Bahasa: Setio Budi HH. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Dhakidae, Daniel. *Pasar Pendidikan*. PRISMA. Juli 1980. No. 7. Th. VII. Hal. 2
- Fanie, Zainuddin. 2000. *Perspektif Ideologis dalam Indonesia Kontemporer*. Dalam Satoto, Soediro dan Zainuddin Fanie (eds). *Sastra: Ideologi, Politik dan Kekuasaan*. Hal. 13-27. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fiske, John. 1990. *Introduction to Communication Studies*. Second Edition. United States: Routledge.
- Harefa, Andrias. 2002. *Sekolah Saja Tak Pernah Cukup*. Jakarta: Gramedia.
- Irwanto. 2005. *Mau kemana Pendidikan Dasar Kita?* www.kompas.com/kompas-cetak/0505/12/opini/1744895.htm diakses 18 Juni 2008.
- Koesoema, Doni. *Guru: Agent of Change*. Majalah BASIS. Juli-Agustus 2008. Th. 57. No. 07-08. Hal. 30-37.
- Lubis, Mulya .T. *Pendidikan Untuk Apa?* PRISMA. Juli 1980. No. 7. Th. VIII. Hal 16-22
- Mangunwijaya, Y.B. *Paradigma Baru Bagi Pendidikan Rakyat*. Majalah PRISMA. Juli 1980. Th. VIII No 7. Hal 3-15.
- Mas'oed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Muller, Johannes. *Pendidikan Untuk Apa dan Siapa? Pengintegrasian Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat di Indonesia*. PRISMA. November 1979. No. 11 Th. VIII. Hal 70-80.
- Muller, Johannes. *Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan Manusia Dari Cengkeraman Kemelaratan?* PRISMA. Juli 1980. No. 7. Th. VIII. Hal. 42-52
- Murtiningsih, Siti. 2006. *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*. Yogyakarta: Resist Book.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode dan Kritik Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ratra, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, M. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.
- Santosa, Puji. 2000. *Kekuasaan, Ideologi dan Politik dalam dunia Kesusastraan*. Dalam Satoto, Soediro dan Zainuddin Fananie (eds). *Sastra : Ideologi, Politik dan Kekuasaan*. Hal. 249-253. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sasono, Adi. 1979. *Pelita III: Tiga Isyu Pembangunan Nasional*. Lembaga Studi Pembangunan. Hal. 18-27.
- Sayuti, A. Sumitro. *Dialektika Antara Teks dan Konteks Potret Pembangunan dalam Puisi Rendra*. Majalah Horison. Edisi Khusus. April 2002. Th XXXV No 4. Hal. 10-18
- Segers, Rien T. 2000. *Evaluasi Teks Sastra: Sebuah Penelitian ekperimental Berdasarkan Teori Semiotik dan Estetika Resepsi* (terj). Jakarta: Adicita Karya Nusa.
- Sunardi, ST. 2002. *Semiotika Negativa*. Yogyakarta: Kanal.
- Surya, Mohammad. 2002. *Guru Antara Harapan, Kenyataan dan Keharusan*. Dalam Syarieff, Ikhwanuddin. Murtadlo, Dodo (ed). *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru; 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed*. Hal. 323-344. Jakarta: PT. Grasindo.
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKIS.
- Susilo, Joko M. 2007. *Pembodohan Siswa Tersistematis*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher
- Teeuw A. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Topatimasang, Roem. 1998. *Sekolah Itu Candu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Umahuk, Dino. *Esai Sastra: Menjadi Binatang Jalang atau Lonte Pemilik Modal*.
<http://fordisastra.com/modules.php?name=News&file=print&sid=634>. Diakses tanggal 17 Januari 2009
- Waluyo, Herman J. 1991. *Teori dan Apresiasi Puisi*. Jakarta: Erlangga.
- www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2005/12/4/opini.html diakses 6 Juni 2006.